

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **KOTA LANGSA**

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan 20 FEBRUARI 2024

Disahkan oleh

000.8.8.3/KESBANGPOL/KEUANGAN/40/2024

15 FEBRUARI 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA LANGSA

Drs. ZULHADISYAH SULAIMAN, MSP

PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19740112 199302 1 001

Nama SOP

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan

Uang (SPP-TU)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;	Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Penyusunan SPP - TU
2. Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah;	
 Peraturan Walikota Langsa Nomor 68 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa. 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar	1. Komputer/Jaringan LAN
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/RKA Perubahan Badan Kesbangpol Kota Langsa	2. ATK
3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPA Perubahan Badan Kesbangpol Kota Langsa	3. Buku Aturan Tata Naskah Dinas
	4. Program Aplikasi SIPKD
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Pengajuan SPP -TU tidak dilaksanakan, maka akan berimplikasi terhadap realisasi anggaran.	1. Dokumen SPP - TU

	PELAKSANA			MUTU BAKU				
URAIAN PROSEDUR	KEPALA BADAN/ PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PPK/ KASUBBAG KEUANGAN	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KET
Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Kasubbag Keuangan					Disposisi Surat Pencairan Dana	5 M	enit Disposisi Surat Pencairan Dana	
Membuat SPP-TU beserta dokumen lainnya yang terdiri dari : a. Surat Pengantar SPP-TU b. Ringkasan SPP-TU c. Rincian SPP-TU d. Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya e. Salinan SPD f. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU g. Lampiran lainnya					a. Surat Pengantar SPP-TU b. Ringkasan SPP-TU c. Rincian SPP-TU d. Salinan SPD e. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran f. Lampiran (daftar rincian rencana penggunaan jenis belanja)	45 M	enit a. Surat Pengantar SPP-TU b. Ringkasan SPP-TU c. Rincian SPP-TU d. Salinan SPD e. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran f. Lampiran (daftar rincian rencana penggunaan jenis belania)	
Menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lainnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Kasubbag Keuangan					SPP - TU dan Dokumen lainnya	5 M	enit SPP - TU dan Dokumen lainnya	
4. Memeriksa draf Usulan SPP-TU beserta SPD dan DPA- SKPA, jika sudah lengkap akan diberi paraf dan teruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani dan jika belum lengkap akan dikembalikan ke Bendahara untuk dilengkapi	LENGKAP	TIDAK LENGKAP			Draft SPP-TU, SPD dan DPA	30 M	enit Draft SPP-TU, SPD dan DPA	
5. Memeriksa draf Usulan SPP-TU beserta SPD dan DPA- SKPA, jika sudah lengkap akan ditandatangani, dan jika tidak lengkap akan dikembalikan ke PPK/Kasubbag Keuangan untuk dilengkapi			TIDAK LENGKAP		Draft SPP-TU, SPD dan DPA	15 M	enit Draft SPP-TU, SPD dan DPA	
6. Menugaskan JFU untuk mengirim Usulan SPP-TU kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa					SPP - TU yang sudah ditandatangani	5 M	enit SPP - TU yang sudah ditandatangani	
7. Mengirim SPP-TU kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa serta mengarsipkannya					SPP - TU yang sudah ditandatangani	10 M	enit SPP - TU yang sudah ditandatangani	